



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Rencana Kerja Perubahan (RENJA Perubahan 2020)



KATA PENGANTAR

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perubahan tahun 2020 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu di susun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud Undang-undang disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya yang di laksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 disusun untuk jangka waktu 1 tahun. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara berpedoman pada rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2005 – 2025 karena pada tahun 2020 ini Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami masa transisi karena Pimpinan Kabupaten Kutai Kartanegara yang baru.

Lebih lanjut isi dari Renja ini adalah gambaran perencanaan berbagai rencana pembangunan yang menjadi bagian dari tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai program dan kegiatan serta memperhatikan berbagai kondisi dan potensi local yang akan menjadi bagian dalam proses pembangunan di masa-masa yang akan datang.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara, diharapkan rencana kerja ini dapat memberikan kontribusi yang lebih baik lagi bagi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tenggarong, 14 September 2020
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Kutai
Kartanegara
Kepala,



Hj. Aji Lina Rodiah, SE
NIP. 19650325 198503 2 010

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Keputusan Kepala SKPD.....	ii
Daftar isi.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1. Latar Belakang.....	4
1.2. Landasan Hukum.....	6
1.3. Maksud dan Tujuan.....	8
1.4. Sistematika Penulisan.....	9
 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA –PD TAHUN LALU.....	 10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD	23
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	30
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	32
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	43
 BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	 44
3.1. Program dan Kegiatan	44
 BAB IV PENUTUP	 54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 . LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan global. Perencanaan pembangunan daerah sangat penting untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah secara sistematis terarah terpadu menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan yang berjangka panjang, menengah dan jangka pendek, sebagaimana diamanatkan dalam UU nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-OPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana program kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Rencana kerja (Renja) Tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak menjabarkan visi dan misi serta arah pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra).

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah juga melaksanakan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, dimana penyelenggaraan tata pemerintah melakukan pengintegrasian gender melalui kelembagaan, perencanaan, dan penganggaran.

Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi

stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis dan implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 di mana Renja merupakan dokumen perencanaan OPD untuk 1(satu) tahunan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Dalam Rencana Kerja memuat visi misi tujuan kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan yang bersifat indikatif didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di daerah dan berorientasi pada hasil yang akan di capai selama kurun waktu 1 tahun .

Hal tersebut merupakan pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah, DPRD, kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak dibidang sosial budaya, ekonomi, politik dan keamanan. Untuk mencapai hal tersebut proses pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan adalah merupakan instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, dengan kata lain perencanaan pembangunan yang baik akan dapat menghasilkan pembangunan yang baik yang dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar.

Dalam RPJM Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 diamanatkan tujuh misi pembangunan Kutai Kartanegara, yaitu : pada misi ke tujuh yaitu "MENINGKATNYA PERAN SERTA PEREMPUAN SEGALA BIDANG PEMBANGUNAN DAN PERLINDUNGAN ANAK "

Dalam pencapaian Visi dan Misi RPJMD Tahun 2016-2021 Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat beberapa persoalan-persoalan pembangunan yang telah dirumuskan dan harus segera diatasi yaitu belum optimalnya peranan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan (kesetaraan gender).

Rencana Kerja (Renja) OPD Dinas PP dan PA merupakan rencana kerja dalam rangka penentuan kebijakan pembangunan daerah guna mencapai tujuan dan target pembangunan yang telah ditetapkan dalam misi ke tujuh RPJMD pembangunan tersebut.

1.2. LANDASAN HUKUM

Adapun pelaksanaan Penyusunan Rencana (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020 memperhatikan kepada peraturan Perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan Renja dan arah garis kebijakan terkait yang di rumuskan antara lain :

- 1) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 2 Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7) Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 - 10) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - 12) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - 14) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - 15) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 - 16) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari dibuatnya Rencana kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 adalah :

1. untuk menentukan arah pelaksanaan pembangunan serta sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun yang sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati/Wakil Bupati Kutai Kartanegara Periode 2016-2021.
2. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2020.

Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu :

- 1 Menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai visi misi Pemerintah Daerah.
- 2 Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas PP dan PA dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu terarah dan terukur.
- 3 Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 1 tahun.
- 4 Memberikan pedoman alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA –PD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

- 4.1. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja –PD Tahun lalu dan Capaian Renstra

Proses Penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh OPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut, hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Rencana Kerja (RENJA) suatu OPD adalah Penjabaran Perencanaan tahunan dari Rencana Strategis OPD tersebut, tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan, Laporan Kinerja adalah Iktisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur, Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu suatu kebijakan / Program / kegiatan dan sekaligus merupakan alat ukur untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas.

Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan. Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan, keluaran dan hasil. Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan sebagainya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besarnya indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Capaian Analisis Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Adapun capaian analisis kinerja dan rekapitulasi pelaksanaan Renja sebagaimana mestinya.

Pada tahun 2018 rencana Kerja Dinas PP dan PA dengan indikator yang ingin dicapai sesuai dengan sasaran renstra SKPD pada tahun tersebut sebanyak 14 indikator Outcome dengan pagu program kegiatan yang direncanakan sebesar Rp. 2.942.612.900,-

Pada tahun 2018 dari rencana pada renja dibanding realisasi ada beberapa yang tidak memenuhi target yang terdiri :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan cakupan layanan administrasi perkantoran mencapai 100%;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Persentase sarana dan prasarana kantor mencapai 100%;
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan Cakupan Tingkat Capaian Akuntabilitas Kinerja mencapai 100%
4. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dengan Indikator Persentase OPD yang Melaksanakan ARG dan PPRG 81,03%, Persentase Kelembagaan PUG Aktif 78,13% dan Partisipasi anak dalam pembangunan (musrenbang) 27,34%.
5. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dengan cakupan Rasio KDRT baru tercapai 0,0024% dan Persentase perempuan di Legislatif masih tercapai 8,80%
6. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan dengan cakupan Kota Layak Anak mencapai 88,89%, Persentase Perempuan di Eksekutif mencapai 25,36%, Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan/KDRT yang Ditangani 95,65% dan Persentase kelompok Program

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang aktif baru tercapai 3,38%, Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan/KDRT yang Ditangani mencapai 100%

7. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan dengan Persentase Organisasi Perempuan yang di Bina tercapai 12,50%
8. Program Pemenuhan hak - hak anak dengan Persentase Ruang Publik Ramah Anak (RPPRA) tingkat kecamatan baru tercapai 33,33% dan Persentase fasilitasi layanan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) baru tercapai 16,67%
9. Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dengan Indikator Persentase Kelompok Usaha Perempuan yang dibina baru tercapai 7,99 %

Sedangkan pada tahun 2019 terjadi kenaikan dari tahun 2018 anggaran dikelola oleh dinas PP dan PA sebesar 20,7% sehingga akan berpengaruh terhadap capaian indikator Kinerja Utama maupun Indikator Kinerja Program yang akan ditargetkan sebagai berikut :

1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dengan Indikator Persentase OPD yang Persentase OPD yang melaksanakan ARG 5,17%, Persentase PD yang memiliki Data Gender 5,17%.
2. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dengan indikator Persentase perempuan di lembaga legislatif dan eksekutif 25,55%.
3. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan dengan indikator Cakupan pelayanan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO 100%, Persentase kelompok Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang aktif 8,44%
4. Program Pemenuhan hak - hak anak dengan indikator Kecamatan Layak Anak 22,2%.
5. Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dengan indikator Persentase Pelaku Usaha Perempuan yang mendapatkan pembinaan ditargetkan 1,88%

Dapat dilihat dari tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja-OPD dan Pencapaian Renstra-OPD s/d Tahun 2018;

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2018
Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KODE	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Indikator Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 2016-2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan S/d 2017	Target dan Realisasi Kinerja			Target Program dan Kegiatan Renja 2019	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja tahun 2018	Realisasi Renja 2018	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2019	Tingkat capaian Realisasi target Rensta(%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase OPD yang Melaksanakan ARG dan PPRG	93,10	70,41	81,03	81,03	100,00	86,21	86,21	92,59
	Rapat Koordinasi PP dan PA	Jumlah Peserta	950	300	60	60	100,00	200	560	58,95
	Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Jumlah OPD yang melaksanakan PUG dan PPRG	83	53	53	-	-	0	0	0,00
	Advokasi/Pendampingan Penyusunan PPRG	Jumlah OPD Mengikuti Pendampingan Penyusunan PPRG	290	-	32	-	-	0	0	0,00
	Workshop PPRG	Jumlah Peserta yang menyusun PPRG	726	-	150	-	-	0	0	0,00
	2	Persentase Kelembagaan PUG Aktif	100	46,875	78,125	78,125	100,00	62,00	62,00	62,00
	Penguatan Pokja PUG	Jumlah OPD yang melaksanakan PUG	71	12	40	40	100,00	12	64	90,14
	Penguatan Kelembagaan PUG dengan Perguruan Tinggi Pusat studi Gender dan Organisasi Masyarakat	Jumlah Kelembagaan	40	5	5	5			0	0,00
	Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)	Jumlah Peserta Mengikuti pengembangan KIE Tentang KKG	1.800	-	0	-			0	0,00
	Penyusunan Data Terpilah Gender	Jumlah Dokumen	5		1	1	100,00	1	2	40,00
	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Jumlah Sistem Informasi Data Gender dan Anak	5	1						0,00

KODE	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Indikator Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 2016-2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan S/d 2017	Target dan Realisasi Kinerja			Target Program dan Kegiatan Renja 2019	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja tahun 2018	Realisasi Renja 2018	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2019	Tingkat capaian Realisasi target Rensta(%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Fasilitasi Pengembangan Desa Gender	Jumlah Desa Gender yang difasilitasi	50	5						0,00
	Pembinaan Desa Gender	Jumlah Desa Gender yang di Bina	36	2	7	7	100,00			0,00
	Penyusunan Regulasi Desa Gender	Jumlah Dokumen	1	-						0,00
	Kajian Pembangunan Manusia Berbasis Gender	Jumlah kajian Pembangunan Manusia Berbasis Gender	5							0,00
	Pembentukan Gender champions bagi PD	Jumlah orang yang mampu menjadi Gender champion di PD	58						0	0,00
	Fasilitasi Hasil Penilaian Program Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Penilaian Program PP Perusahaan Pembina P2WKSS, RSSI&B, dan GSI/ KSI	100						0	0,00
	3	Partisipasi anak dalam pembangunan (musrenbang)	100	7,42	27,34	27,34	100,00	34,38	69	69,14
	Fasilitasi Forum anak (Pengarusutamaan Hak anak)	Jumlah forum anak yang terbentuk	211	5	2	2	100,00	3	10	4,74
	Workshop Pengarusutamaan Hak anak	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Workshop	400						0	0,00
	4 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rasio KDRT	17,50	0,01217	0,00243	0,00243	100,00	0,00974	0,02678	0,15
	Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	Jumlah Korban Kekerasan Perempuan Yang ditangani	500	120	100	64	64,00	40	224	44,80

KODE	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Indikator Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 2016-2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan S/d 2017	Target dan Realisasi Kinerja			Target Program dan Kegiatan Renja 2019	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja tahun 2018	Realisasi Renja 2018	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2019	Tingkat capaian Realisasi target Rensta(%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dari Berbagai Tindak Kekerasan	Jumlah Peserta Mengikuti Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dari Berbagai Tindak Kekerasan	100						0	0,00
	Pelatihan SOP dan SPM Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Jumlah Peserta Pelatihan SOP dan SPM Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	50						0	0,00
	Sosialisasi Perundang-Undangan Kebijakan Tentang Perlindungan Perempuan/Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Jumlah Peserta Sosialisasi Perundang-Undangan Kebijakan Tentang Perlindungan Perempuan/Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	150						0	0,00
	Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT	Meningkatkan Jumlah Tenaga Terlatih dalam Pelayanan dan Pendampingan KTP/ KTA	90						0	0,00
	5	Persentase perempuan di Legislatif	30	8,89	8,89	8,89	100,00	26,67	27	88,89
	Fasilitasi Kebijakan Peningkatan Peran dan Posisi Perempuan di Bidang Politik	Jumlah regulasi tentang Kebijakan Peningkatan Peran dan Posisi Perempuan di Bidang Politik	5				#DIV/0!		0	0,00
	Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dalam Politik, Sosial dan Hukum	Jumlah Peserta Peningkatan Peran Perempuan dalam Politik, Sosial dan Hukum	500	-	50	50	100,00	100	150	30,00

KODE					Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Indikator Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 2016-2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan S/d 2017	Target dan Realisasi Kinerja			Target Program dan Kegiatan Renja 2019	Perkiraan Realisasi Capaian	
									Target Renja tahun 2018	Realisasi Renja 2018	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2019	Tingkat capaian Realisasi target Rensta(%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				6	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Persentase Organisasi Perempuan yang di Bina	100	4,17	12,50	12,50	100,00	12,50	16,67	16,67
					Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah Organisasi Yang dibina	27	1	3	3	100,00	3	7	25,93
					Peringatan Hari-Hari Besar Perempuan	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Perempuan	17	-					0	0,00
					Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan	Terlaksananya Pameran Hasil Karya Perempuan dalam Pembangunan	50	-					0	0,00
				7		Persentase perempuan rentan (KK Perempuan miskin, mantan napi,lansia, perempuan korban kekerasan termasuk TPPO) yang ditangani sesuai standar	16				#DIV/0!	2,18	2	13,33
					Penyusunan Profil Perlindungan Perempuan Lansia dan Perempuan Berkebutuhan Khusus (Cacat)	Jumlah Dokumen Penyusunan Profil Perlindungan Perempuan Lansia dan Perempuan Berkebutuhan Khusus (Cacat)	5	1			#DIV/0!			0,00
					Penyusunan Profil Perempuan Rentan Miskin	Jumlah Dokumen Profil Perempuan Miskin	5	-			#DIV/0!		0	0,00
					Sosialisasi Pengembangan diri untuk Perempuan Korban Kekerasan (TPP), Kepala Keluarga Perempuan Miskin, Mantan Napi, Lansia	Jumlah Perempuan Renta Mengikuti Sosialisasi Pengembangan diri untuk Perempuan Korban Kekerasan (TPP), Kepala Keluarga Perempuan Miskin, Mantan Napi, Lansia	1.500	-			#DIV/0!		0	0,00
				8	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Kabupaten Layak Anak (KLA)	100	72,22	88,89	88,89	100,00	100,00	100,00	100,00

KODE	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Indikator Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 2016-2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan S/d 2017	Target dan Realisasi Kinerja			Target Program dan Kegiatan Renja 2019	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja tahun 2018	Realisasi Renja 2018	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2019	Tingkat capaian Realisasi target Rensta(%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Fasilitasi Kabupaten Layak Anak (KLA)	Jumlah Kecamatan yg menginisiasi KLA	18	5	2	2	100,00	3	10	55,56
	RAD KLA Kab Kukar	Jumlah Dokumen RAD KLA	215	-					0	0,00
	Sosialisasi perundang-undangan perlindungan dan Pemenuhan Hak anak	Jumlah Masyarakat yg mengikuti Sosialisasi	1.500	-					0	0,00
	KIE Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Media KIE	8	-					0	0,00
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Melek Huruf Pada Anak	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Melek Huruf Pada Anak	400	-					0	0,00
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Pencegahan Tenaga Kerja anak	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Pencegahan Tenaga Kerja anak	400	-					0	0,00
	Sosialisasi dan Advokasi Tumbuh Kembang Anak	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Advokasi Tumbuh Kembang Anak	400	-					0	0,00
	Pendataan Anak Putus Sekolah tingkat SD, SLTP dan SLTA	Jumlah Kecamatan Pendataan Anak Putus Sekolah tingkat SD, SLTP dan SLTA	18	-					0	0,00
	Profil Anak Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Profil Anak Kabupaten Kutai Kartanegara	2	-					0	0,00
	Fasilitasi Pelaksanaan Program Telepon sahabat anak	Jumlah line telepon yg dapat diakses anak	5	-					0	0,00
	Pelatihan Konvensi Hak anak	Jumlah OPD/Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Konvensi Hak anak	450	-					0	0,00
	Parenting bagi orang tua siswa	Jumlah Orang tua Siswa yang mengerti cara mendidik anak	1.000	-					0	0,00

KODE	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Indikator Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 2016-2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan S/d 2017	Target dan Realisasi Kinerja			Target Program dan Kegiatan Renja 2019	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja tahun 2018	Realisasi Renja 2018	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2019	Tingkat capaian Realisasi target Rensta(%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Worskshop gerakan mendongeng dan lomba lagu anak-anak Kutai Kartanegara	orang tua yang bisa mendongeng dan anak yang mengikuti lomba lagu	1.000	-					0	0,00
	Fasilitasi Hari Besar Anak	Jumlah Peserta Anak yang mengikuti peringatan Hari besar anak	3.000	-	500	500	100,00	500	1000	33,33
	9	Persentase Perempuan di Eksekutif	30,0		25,36	25,36	100,00	25,36	25,36	84,59
	Fasilitasi Kebijakan Peningkatan Peran dan Posisi Perempuan di Jabatan Publik	Jumlah Kebijakan Tentang Peningkatan Peran dan Posisi Perempuan di Jabatan Publik	6	-					0	0,00
	Workshop Peningkatan Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan (Jabatan Publik)	Jumlah Peserta Workshop Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan	1.000	-					0	0,00
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan	Jumlah Peserta Pekerja Perempuan	2.600	-					0	0,00
	Fasilitasi Penghapusan Buta Aksara Perempuan	Jumlah Peserta Buta Aksara Perempuan	600	-					0	0,00
	10	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan/KDRT yang Ditangani	100	76,85	100	95,65	95,65	100	100	100,00
	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)	Persentase Pengaduan yang Terlayani	100	100	100	95,65	95,65	2	104	104,00
	Pelatihan pendampingan korban kekerasan anak	jumlah aparat yang mendapat pelatihan di Tk Kab, Kec & Kel	80	-					0	0,00
	Sosialisasi masalah sosial anak	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi di sekolah	1.200	-	300	150	50,00	150	300	25,00
	Fasilitasi Penanganan masalah kekerasan terhadap anak	Jumlah anak korban kekerasan yang di layani	120	-	30	21	70,00	40	61	50,83

KODE					Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Indikator Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 2016-2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan S/d 2017	Target dan Realisasi Kinerja			Target Program dan Kegiatan Renja 2019	Perkiraan Realisasi Capaian	
									Target Renja tahun 2018	Realisasi Renja 2018	Tingkat Realisasi%		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2019	Tingkat capaian Realisasi target Rensta(%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					RAD Gugus Tugas trafficking	Jmlh SKPD yg terlibat dalam Rakor	163	-					0	0,00
					Pemetaan Jumlah Kekerasan Perempuan dan Anak Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Tentang Perempuan dan Anak	18	-				1	1	5,56
				11		Persentase kelompok Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang aktif	32,07	1,69	4,64	3,38	72,73	8,44	13,50	42,11
					Pembentukan kelompok Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Jumlah kelompok Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang dibentuk	40	-					0	0,00
					Pelatihan dan Pengembangan Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan	190	-				60	60	31,58
				12	Program Pemenuhan hak - hak anak	Persentase Ruang Publik Ramah Anak (RPRA) tingkat kecamatan	100	16,67	33,33	33,33	100,00	50,00	50,00	50,00
					Identifikasi dan koordinasi RPRA	Jumlah Kec yang di identifikasi dan di koordinasi	28	-			#DIV/0!		0	0,00
				13		Persentase fasilitasi layanan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)	100	16,67	16,67	16,67	100,00	33,33	67	66,67
					Pelatihan Penanganan bagi anak berkebutuhan khusus	Jumlah Peserta Pelatihan Penanganan bagi anak berkebutuhan khusus	375	-			#DIV/0!		0	0,00
					Pendataan Anak berkebutuhan khusus	Dokumen Data Anak berkebutuhan Khusus	2.000	-			#DIV/0!		0	0,00
					Fasilitasi Pelatihan Komunikasi terapis autis (ABK)	Jumlah Tenaga terapis yang terlatih	30	-			#DIV/0!		0	0,00
					Fasilitasi Forum Peduli ABK	Jumlah Forum Peduli ABK yang terbentuk dikecamatan	19	4	3	3	100,00	4	11	57,89

KODE	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Indikator Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 2016-2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan S/d 2017	Target dan Realisasi Kinerja			Target Program dan Kegiatan Renja 2019	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja tahun 2018	Realisasi Renja 2018	Tingkat Realisasi%		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2019	Tingkat capaian Realisasi target Rensta(%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Fasilitasi Forum Peduli ABK	Jumlah Forum Peduli ABK yang terbentuk dikecamatan	19	4	3	3	100,00	4	11	57,89
	Penyusunan Profil Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus	Dokumen Profil Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus	4	-			#DIV/0!		0	0,00
	Pameran Hasil Karya Anak	Jumlah Pameran Hasil Karya Anak	8	-			#DIV/0!		0	0,00
	14Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Persentase Kelompok Usaha Perempuan yang dibina	100	6,110	9,399	7,999	85,10	11,279	11,279	11,28
	Bimbingan Manajemen Usaha Perempuan	Jumlah Usaha Perempuan yang dibina	797	100	10	10	100,00	157	267	33,50
	Evaluasi Ekonomi Produktif Perempuan	Jumlah Dokumen Ekonomi Produktif Perempuan	5	-			#DIV/0!		0	0,00
	Penyusunan Profil Ekonomi Perempuan	Jumlah Dokumen Profil Ekonomi Perempuan	5	-			#DIV/0!		0	0,00
	Gelar Dagang Ekonomi Perempuan	Jumlah Gelar Dagang Ekonomi Perempuan	50	-			#DIV/0!		0	0,00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100	100	100,00	100,00	100	100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi dan informasi	12	12	12	12	100,00	12	36	300,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan Dinas	140	27	27	27	100,00	28	82	58,57
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Aparatur	66	21	12	12	100,00	11	44	66,67
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Perbaikan peralatan Kerja	3.100	20	52	52	100,00	52	124	4,00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah penyediaan Alat Tulis Kantor	230	35	48	48	100,00	52	135	58,70

KODE	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Indikator Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 2016-2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan S/d 2017	Target dan Realisasi Kinerja			Target Program dan Kegiatan Renja 2019	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja tahun 2018	Realisasi Renja 2018	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2019	Tingkat capaian Realisasi target Rensta(%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan penggandaan	6.468	250	1518	1518	100,00	1.000	2768	42,80
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan	46.296	0	1584	1584	100,00	7.716	9300	20,09
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah makan minum	212	0	10	10	100,00	12	22	10,38
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih	72	12	12	12	100,00	12	36	50,00
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah dan ke luar daerah	Jumlah Aparatur	372	55	60	94	156,67	62	211	56,72
	Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Honorer	114	19	19	19	100,00	19	57	50,00
	Fasilitasi Memperingati Hari-hari Besar tertentu (Pameran)	Jumlah Pameran	18	0	2	0	-	2	2	11,11
	Penataan Arsip Internal Perangkat Daerah	Jumlah Arsip yang dikelola	18	0	2	0	-	1	1	5,56
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana Prasarana dalam Kondisi Baik	100	100	100,00	61	100,00	80,00	80	80,00
	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	48	27	27	27	100,00	28	82	170,83
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan	133	5	11	11	100,00	15	31	23,31
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Nilai Kinerja SKP	100	85	100	85	85,00	85	85	85,00
	Fasilitasi TIM BEKIAS							20		
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketepatan Waktu Laporan Keuangan dan Aset	100	100	100,00	100	100,00	100,00	100	100,00
	Penyusunan Dokumen Rencana Laporan Keuangan dan Kinerja	Jumlah Dokumen	36	0	6	6	100,00	6	12	33,33
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Ruangan	36	0	6	6	100,00	12	18	50,00

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Dasar pembentukan Dinas PP dan PA Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pemetaan Kewenangan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara serta Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Dinas PP dan PA Kabupaten Kutai Kartanegara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2007, tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (PTPPO) untuk memerangi perdagangan orang membutuhkan penanganan yang komperhensif dan multi sektor, diharapkan pemerintah daerah (Kutai Kartanegara) memiliki kerangka hukum mengenai (PTPPO) dan partisipasi setiap anggota masyarakat termasuk anggota keluarga untuk mengambil langkah pencegahan, untuk data perdagangan orang/trafficking, sebanyak 2 kasus tahun 2016.

Belum tersedianya pemetaan data khusus untuk kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan dengan adanya pemetaan kasus kekerasan ini dapat memudahkan dalam hal penanganan dimasing-masing desa /kecamatan

Perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan *trafficking* dan peningkatan layanan terpadu bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Meski telah ada Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT, pembangunan pusat-pusat krisis terpadu di rumah sakit, pembangunan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di Polda dan Polres, serta pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan Anak (P2TP2A) di

daerah, dan penyebaran informasi dan kampanye anti-kekerasan terhadap perempuan dan anak, namun upaya tersebut belum cukup untuk menekan tingginya tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak. Pada tahun 2018 berjumlah 138 kasus.

Untuk penanganan Korban Tindak Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak secara terpadu maka perlu dibentuk Gugus Tugas Pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta penyediaan wadah Advokasi, Sosialisasi dan Koordinasi dalam penanggulangan dan perlindungan Perempuan dan Anak yaitu P2TP2A.

Pada Misi Ke tujuh RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Meningkatkan peran serta perempuan segala bidang pembangunan dan perlindungan anak, adapun sasaran yang ingin dicapai Meningkatkan partisipasi perempuan dalam perempuan membangun, kualitas kesetaraan gender dan perlindungan perempuan dan anak dengan Indikator sebagai berikut :

- ❖ IPG (Indeks Pembangunan Gender)
- ❖ IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)
- ❖ Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)
- ❖ Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah tolak ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Standar Pelayanan Minimal Bidang Bidang Layanan Terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 yang terdiri dari 5 jenis pelayanan dan 22 indikator kinerja. Pencapaian indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 terhadap target SPM adalah 66,67% atau sebanyak 7 indikator kinerja yang berhasil mencapai target

dari 22 indikator kinerja SPM. Rincian pencapaian indikator kinerja terhadap target per jenis pelayanan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Standar Pelayanan Minimal ini berisikan 5 (lima) layanan dasar dan 8 (delapan) indikator utama, selanjutnya akan diuraikan satu persatu bagaimana masing-masing indikator tersebut dilaksanakan. Agar pelaksanaan dan mutu layanan menjadi standar, perlu dikembangkan sebuah petunjuk teknis yang akan memberikan pedoman pelaksanaan di setiap layanan dan disertai dengan indikator serta cara perhitungan masing-masing indikator.

1. Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan indikator utama: Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu.

Penanganan laporan/pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak juga dapat diukur melalui indikator penunjang: Cakupan ketersediaan petugas di unit pelayanan terpadu yang memiliki kemampuan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, dalam hal ini adalah kemampuan untuk penjangkauan korban dan menindaklanjuti pengaduan yang berkaitan dengan dugaan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak.

2. Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dengan indikator utama: Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit.

Pelayanan kesehatan yang dimaksud dalam SPM ini adalah pelayanan yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih yaitu dokter spesialis, dokter, dokter gigi, perawat/bidan yang sudah mendapat pelatihan tentang tatalaksana medis kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pelayanan kesehatan dimaksud dilakukan di rumah sakit yang memberikan pelayanan terpadu dan juga di puskesmas yang memberikan pelayanan dasar komprehensif. Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan juga dapat diukur melalui indikator penunjang:

- a. Cakupan Puskesmas mampu tatalaksana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;

- b. Cakupan RSU vertikal/RSUD/RS swasta, yang melaksanakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan
 - c. Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Puskesmas;
 - d. Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di RS.
3. Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dengan indikator utama:
- a) Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu;
 - b) Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.

Pelayanan rehabilitasi sosial yang dimaksud dalam SPM ini adalah : pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Pelayanan rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan dapat pula diukur melalui indikator penunjang :

- Cakupan petugas rehabilitasi sosial yang terlatih;
 - Cakupan petugas pembimbing rohani yang terlatih dalam melakukan bimbingan rohani.
4. Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dengan indikator utama :
- Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum.

Penegakan hukum adalah tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender.

Penegakan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan juga dapat diukur melalui indikator penunjang:

- Cakupan penyelesaian penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat kepolisian;
- Cakupan ketersediaan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Polda dan Polres/ta;
- Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana di UPPA;
- Cakupan ketersediaan polisi yang terlatih dalam memberikan layanan yang sensitif gender;
- Cakupan ketersediaan jaksa yang terlatih dalam penuntutan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- Cakupan ketersediaan hakim yang terlatih dalam menangani perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selanjutnya, untuk layanan bantuan hukum juga dapat diukur melalui indikator penunjang: Cakupan ketersediaan petugas pendamping hukum atau advokat yang mempunyai kemampuan pendampingan pada saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

5. Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dengan indikator utama:

- Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Khusus untuk pelayanan reintegrasi sosial, juga dapat diukur melalui indikator penunjang:
- Cakupan ketersediaan petugas terlatih untuk melakukan reintegrasi sosial.

Dari hasil pembahasan di berdasarkan visi dan misi pemerintah kabupaten kutai kartanegara dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam rangka mencapai untuk maksimalkan pekayaan OPD DPPPA tahun 2016-2021 memiliki indikator sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan OPD DPPPA dapat dilihat dari Tabel 2.2 tentang pencapaian kinerja Pelayanan Organisasi Pelayanan Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra -PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan analisis
				2016	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)	100	100	100%	100%	100%	100%	84,73%	95,65%	100%	100%	
2	Penurunan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (kasus kekerasan)			180	175	160	130	131	138	130	110	
3	IPG			80,00	82,00	84,00	86,00	62,20	62,57	86,00	88,00	
4	IDG			53,11	53,99	54,21	56,29	56,65	58,87	56,29	57,33	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak di atas dan peran Dinas PP PA Kabupaten Kutai Kartanegara dalam di kabupaten Kutai Kartanegara dan dengan memperhatikan perkembangan dan tantangan yang mutakhir dewasa ini, maka isu permasalahan yang masih dihadapi oleh Dinas PP PA Kabupaten Kutai Kartanegara adalah:

1. Masih tingginya korban kekerasan terhadap perempuan perempuan dan anak dan belum didampingi seluruhnya oleh tenaga terlatih
2. Kurangnya pemahaman stakeholder terhadap hak-hak anak
3. Kelembagaan PUG di OPD belum Optimal
4. Rendahnya Angka IPG dan IDG
5. Belum terwujudnya keadilan dan kesetaraan Gender (KKG) secara maksimal
6. Implementasi Kebijakan masih belum Optimal
7. Kurangnya perempuan sebagai pelaku ekonomi

Dari permasalahan diatas Dinas PP PA Kabupaten Kutai Kartanegara guna mewujudkan pencapaian tujuan masyarakat Kutai Kartanegara secara bersama yang intinya adalah dalam rangka mewujudkan masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera. Oleh karena itu maka peran perempuan Kutai Kartanegara dalam bidang ekonomi pendidikan dan kesehatan harus terus ditingkatkan.

Dinas PP PA Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Dinas koordinatif dalam pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, memiliki beberapa program terkait dengan rencana tata ruang wilayah. Program tersebut adalah Program Keserasian Kebijakan Kualitas Perempuan dan anak dalam kegiatan Fasilitas Kabupaten Layak Anak, RAD KLA Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal tersebut sesuai amanah peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator kabupaten Kota Layak anak. Juga memperhatikan Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak no 56 thn 2010 tanggal 26 juli 2010 tentang penunjukan dan Penetapan bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara ditunjuk sebagai 10 Kabupaten / Kota pengembang kota / Kabupaten kota layak anak. Berkenaan dengan hal diatas dapat diidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap

kebutuhan pelayanan Dinas PP PA Kabupaten Kutai Kartanegara disusun dalam rancangan program pembangunan menuju kabupaten layak anak (KLA). KLA adalah Pembangunan menuju kabupaten/kota layak anak, yaitu sistem pembangunan berbasis pemenuhan hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Pembangunan berbasis pada perwujudan menuju kabupaten/kota layak anak secara tidak langsung akan memenuhi kebutuhan penataan ruang sebuah lingkungan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD:

- Ketersediaan dan kemudahan jangkauan Lembaga Kesejahteraan Anak;
- Jumlah Pojok ASI yang memadai dan layak, di tempat umum (Bandara, pusat perbelanjaan, terminal dll) tempat kerja;
- Ketersediaan Rumah Tangga dengan akses air bersih;
- Ketersediaan Kawasan tanpa asap rokok;
- Tersedianya sekolah yang ramah Anak;
- Ketersediaan dan kemudahan jangkauan Lembaga Kesejahteraan Anak;
- Tersedianya sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah;
- Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif yang ramah anak diluar sekolah dan dapat diakses semua anak;
- Tersedianya lembaga perlindungan anak bermasalah dengan hukum; dan
- Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan keperluan anak.

Untuk menaggulangi permasalahan dan isu-isu diatas maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan salah satunya adalah melalui :

1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dengan indikator yang ingin dicapai Persentase OPD yang melaksanakan ARG dan Persentase PD yang memiliki Data yang terdiri dari salah satu kegiatannya Rapat Koordinasi PP dan PA, Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaa Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan Penyusunan Data Terpilah Gender

2. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dengan Indikator yang ingin di capai Persentase perempuan di lembaga legislatif dan eksekutif dengan kegiatan yang akan dilaksanakan Workshop Peningkatan Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan
3. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan dengan indikator kinerja yang akan dicapai Cakupan pelayanan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO, Persentase kelompok Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang dengan kegiatan yang ingin usulkan Fasilitasi Pendampingan Korban Kekerasan Pada Perempuan dan Anak dan Pembentukan kelompok Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).
4. Program Pemenuhan hak - hak anak dengan indikator yang ingin dicapai Kecamatan Layak Anak dengan kegiatan yang akan diusulkan diantaranya Fasilitasi Kabupaten Layak Anak (KLA), Fasilitasi Forum anak dan Fasilitasi Forum Peduli ABK
5. Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dengan indikator kinerja Persentase Pelaku Usaha Perempuan yang mendapatkan pembinaan adapun kegiatan yang diusulkan Bimbingan Manajemen Bagi Pelaku Usaha Perempuan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Sejalan dengan pokok-pokok kebijakan dan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJPD dan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu menyusun Rencana Strategis (RENSTRA). Dokumen Renstra OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016 – 2021 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 – 2021 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah, yang dalam proses penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJMD. Renstra SKPD dijabarkan setiap tahun kedalam Rencana Kerja SKPD sebagai pedoman dalam penyusunan RKA OPD yang mengacu pada kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA- PPAS).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas ada perubahan dalam sasaran strategis dimana pada awal perencanaan renstra terdapat dua (2) sasaran, setelah dokumen RPJMD Pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021 sudah disahkan sehingga ada perubahan sasaran strategis pada renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dapat dilihat dibawah ini :

SEBELUM		SESUDAH	
Sasaran Strategis	Indikator Kineja Utama	Sasaran Strategis	Indikator Kineja Utama
Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Perempuan Membangun, Kualitas Kesetaraan Gender serta Perlindungan Perempuan dan anak	IPG	Meningkatnya Partisipasi pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta Penguatan Perlindungan Perempuan dan anak	Persentase ARG dalam APBD
	IDG		Kabupaten Layak Anak (KLA)
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)		Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
	Penurunan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (kasus kekerasan)		

Sehingga dapat kita lihat dari tabel 2.4 tentang Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Rancangan Awal RKPD						No	Hasil Analisis Kebutuhan						Penanggung Jawab
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Indikatif		Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	1.214.110.880		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	1.214.110.880	Sekretaris DP3A
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional	DPP & PA	Jumlah kendaraan Dinas	unit	27	45.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional	DPP & PA	Jumlah kendaraan Dinas	unit	27	45.000.000	Kasubag. Umum
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	DPP & PA	Jumlah Aparatur	orang	122	166.804.000		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	DPP & PA	Jumlah Aparatur	orang	122	166.804.000	Kasubag Penyusunan Program & Keu
3	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	DPP & PA	Jumlah Perbaikan peralatan Kerja	Unit	55	50.000.000		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	DPP & PA	Jumlah Perbaikan peralatan Kerja	Unit	55	50.000.000	Kasubag. Umum
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	DPP & PA	Jumlah penyediaan Alat Tulis Kantor	jenis	40	150.000.000		Penyediaan Alat Tulis Kantor	DPP & PA	Jumlah penyediaan Alat Tulis Kantor	jenis	40	150.000.000	Kasubag. Umum
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPP & PA	Jumlah Barang Cetakan dan penggandaan	Cetakan	1110	37.000.000		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPP & PA	Jumlah Barang Cetakan dan penggandaan	Cetakan	1110	37.000.000	Kasubag. Umum
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	DPP & PA	Jumlah bahan bacaan	Exp	4752	25.000.000		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	DPP & PA	Jumlah bahan bacaan	Exp	4752	25.000.000	Kasubag. Umum
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	DPP & PA	jumlah makan minum	bulan	12	65.000.000		Penyediaan Makanan dan Minuman	DPP & PA	jumlah makan minum	bulan	12	65.000.000	Kasubag. Umum
8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah dan ke luar daerah	DPP & PA	Jumlah Aparatur	orang	122	260.000.000		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah dan ke luar daerah	DPP & PA	Jumlah Aparatur	orang	122	260.000.000	Kasubag Penyusunan Program & Keu
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPP & PA	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Jenis	40	10.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPP & PA	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Jenis	40	10.000.000	Kasubag. Umum
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPP & PA	Jumlah jasa komunikasi dan informasi	bulan	12	12.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPP & PA	Jumlah jasa komunikasi dan informasi	bulan	12	12.000.000	Kasubag. Umum
11	Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	DPP & PA	Jumlah Tenaga Honorer	orang	19	218.306.880		Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	DPP & PA	Jumlah Tenaga Honorer	orang	19	218.306.880	Kasubag. Umum

No	Rancangan Awal RKPD						No	Hasil Analisis Kebutuhan						Penanggung Jawab
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Indikatif		Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	Penataan arsip perangkat daerah	DPP & PA	Jumlah paket penataan arsip	Paket	1	50.000.000		Penataan arsip perangkat daerah	DPP & PA	Jumlah paket penataan arsip	Paket	1	50.000.000	Kasubag. Umum
13	Fasilitasi kegiatan hari besar/nasional dan pameran	DPP & PA	Jumlah Pameran	pameran	3	125.000.000		Fasilitasi kegiatan hari besar/nasional dan pameran	DPP & PA	Jumlah Pameran	pameran	3	125.000.000	Kasubag. Umum
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	DPP & PA	Cakupan Sarana Prasarana dalam Kondisi Baik	%	100	225.000.000		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	DPP & PA	Cakupan Sarana Prasarana dalam Kondisi Baik	%	100	225.000.000	Sekretaris DP3A
1	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	DPP & PA	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional BKBP3A	Unit	28	75.000.000		Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	DPP & PA	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional BKBP3A	Unit	28	75.000.000	
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	DPP & PA	Jumlah Perlengkapan		30	100.000.000		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	DPP & PA	Jumlah Perlengkapan		30	100.000.000	
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	DPP & PA	Jumlah Gedung Pemeliharaan	Gedung	5	50.000.000		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	DPP & PA	Jumlah Gedung Pemeliharaan	Gedung	5	50.000.000	
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Jumlah Pelanggaran Disiplin Aparatur	Surat	0	122.000.000		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Jumlah Pelanggaran Disiplin Aparatur	Surat	0	122.000.000	Sekretaris DP3A
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	DPP & PA	Jumlah Pengadaan	Stel	61	122.000.000		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	DPP & PA	Jumlah Pengadaan	Stel	61	122.000.000	Kasubag. Kepegawaian
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Rata-Rata Nilai Kinerja SKP	Rata-rata	85	210.000.000		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Rata-Rata Nilai Kinerja SKP	Rata-rata	85	210.000.000	Sekretaris DP3A
1	Fasilitasi Tim BEKIAS	DPP & PA	Jumlah orang yang difasilitasi	Orang	20	100.000.000		Fasilitasi Tim BEKIAS	DPP & PA	Jumlah orang yang difasilitasi	Orang	20	100.000.000	
2	Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur	DPP & PA	Jumlah Aparatur yang dilatih	...	30	50.000.000		Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur	DPP & PA	Jumlah Aparatur yang dilatih	...	30	50.000.000	Kasubag. Kepegawaian

No	Rancangan Awal RKPD						No	Hasil Analisis Kebutuhan						Penanggung Jawab
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Indikatif		Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur	DPP & PA	Jumlah Aparatur yang dilatih	...	30	50.000.000		Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur	DPP & PA	Jumlah Aparatur yang dilatih	...	30	50.000.000	Kasubbag. Kepegawaian
3	Workshop / BIMTEK	DPP & PA	Jumlah Aparatur yang dilatih	...	20	60.000.000		Workshop / BIMTEK	DPP & PA	Jumlah Aparatur yang dilatih	...	20	60.000.000	Kasubbag. Kepegawaian
V	Program Peningkatan Pengembangan System Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Ketepatan Waktu Laporan Keuangan dan Aset	%	100%	150.000.000		Program Peningkatan Pengembangan System Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Ketepatan Waktu Laporan Keuangan dan Aset	%	100%	150.000.000	Sekretaris DP3A
1	Penyusunan Dokumen Rencana Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan	DPP & PA	Jumlah Dokumen	Dokumen	6	150.000.000		Penyusunan Dokumen Rencana Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan	DPP & PA	Jumlah Dokumen	Dokumen	6	150.000.000	Kasubbag. Program dan Keuangan
2	Inventarisasi Aset Perangkat Daerah	DPP & PA	Jumlah Ruang yang diinventarisasi	Ruag	12	-		Inventarisasi Aset Perangkat Daerah	DPP & PA	Jumlah Ruang yang diinventarisasi	Ruag	12	-	Kasubbag. Program dan Keuangan
VI	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak					3.450.000.000		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak					3.450.000.000	Bidang KHPKKDI
			Persentase OPD yang Melaksanakan ARG	%	89,66	1.500.000.000				Persentase OPD yang Melaksanakan ARG	%	89,66	1.500.000.000	
1	Rapat Koordinasi PP dan PA	Kab. Kukar	Jumlah OPD	OPD	58	250.000.000		Rapat Koordinasi PP dan PA	Kab. Kukar	Jumlah OPD	OPD	58	250.000.000	Pindah Indikator program

No	Rancangan Awal RKPD						No	Hasil Analisis Kebutuhan						Penanggung Jawab
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Indikatif		Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Pembinaan Organisasi Perempuan	Kab. Kukar	Jumlah Organisasi	Organisasi	8	150.000.000		Pembinaan Organisasi Perempuan	Kab. Kukar	Jumlah Organisasi	Organisasi	8	150.000.000	Pindahan dari program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
3	Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	Dokumen	1	200.000.000		Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	Dokumen	1	200.000.000	Kasubbid. ...
4	Workshop Penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Kab. Kukar	Jumlah peserta workshop PPRG	Peserta	200	300.000.000		Workshop Penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Kab. Kukar	Jumlah peserta workshop PPRG	Peserta	200	300.000.000	Kepala Bidang
5	Pemilihan dan Seleksi Gender Champion	Kab. Kukar	Jumlah Orang	Orang	20	100.000.000		Pemilihan dan Seleksi Gender Champion	Kab. Kukar	Jumlah Orang	Orang	20	100.000.000	Kasubbid. ...
6	Penguatan Pokja PUG	Kab. Kukar	Jumlah POKJA PUG	OPD, Kelembagaan	58	250.000.000		Penguatan Pokja PUG	Kab. Kukar	Jumlah POKJA PUG	OPD, Kelembagaan	58	250.000.000	Kepala Bidang
7	Pembinaan Desa Gender	Kab. Kukar	Jumlah Desa Gender yang di bina	Desa	12	250.000.000		Pembinaan Desa Gender	Kab. Kukar	Jumlah Desa Gender yang di bina	Desa	12	250.000.000	
			Persentase PD yang memiliki data gender	%	86,21	1.950.000.000				Persentase PD yang memiliki data gender	%	86,21	1.950.000.000	
8	Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG)	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	Dokumen	-	-		Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG)	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	Dokumen	-	-	Keg. Baru
9	Penyusunan Panduan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG)	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	Dokumen	-	-		Penyusunan Panduan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG)	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	Dokumen	-	-	Keg. Baru

No	Rancangan Awal RKPD						No	Hasil Analisis Kebutuhan						Penanggung Jawab
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Indikatif		Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	Identifikasi capaian indikator kualitas keluarga	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	Dokumen	1	150.000.000		Identifikasi capaian indikator kualitas keluarga	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	Dokumen	1	150.000.000	Pindahan dari program kualitas ...
11	Kajian Peningkatan Kualitas Keluarga Berbasis Kearifan Lokal	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	Dokumen	1	200.000.000		Kajian Peningkatan Kualitas Keluarga Berbasis Kearifan Lokal	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	Dokumen	1	200.000.000	Pindahan dari program kualitas ...
12	Fasilitasi Kebijakan Data Pilah Gender dan Anak	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	Dokumen	1	200.000.000		Fasilitasi Kebijakan Data Pilah Gender dan Anak	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	Dokumen	1	200.000.000	
13	Pemetaan Potensi yang terkait dengan Data Gender	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	Dokumen	1	200.000.000		Pemetaan Potensi yang terkait dengan Data Gender	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	Dokumen	1	200.000.000	
14	Penyusunan Data Terpilah Gender	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	Dokumen	1	150.000.000		Penyusunan Data Terpilah Gender	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	Dokumen	1	150.000.000	
15	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Kab. Kukar	Jumlah Aplikasi	Aplikasi	1	250.000.000		Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Kab. Kukar	Jumlah Aplikasi	Aplikasi	1	250.000.000	
16	Workshop Forum Data	Kab. Kukar	Jumlah OPD	OPD	1	200.000.000		Workshop Forum Data	Kab. Kukar	Jumlah OPD	OPD	1	200.000.000	
17	Analisis Data Capaian IDG dan IPG	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	Dokumen	1	300.000.000		Analisis Data Capaian IDG dan IPG	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	Dokumen	1	300.000.000	
18	Kajian Pembangunan Manusia Berbasis Gender	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	Dokumen	1	200.000.000		Kajian Pembangunan Manusia Berbasis Gender	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	Dokumen	1	200.000.000	
19	Penyusunan Profil Perlindungan Perempuan Lansia dan Perempuan Berkebutuhan Khusus (Cacat)	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	Dokumen	1	100.000.000		Penyusunan Profil Perlindungan Perempuan Lansia dan Perempuan Berkebutuhan Khusus (Cacat)	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	Dokumen	1	100.000.000	
20	Rapat Koordinasi PP dan PA	Kab. Kukar	Jumlah OPD	OPD				Rapat Koordinasi PP dan PA	Kab. Kukar	Jumlah OPD	OPD			Pindah Indikator program
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan		Persentase perempuan di legislatif dan Eksekutif	Persentase	26,24	300.000.000		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan		Persentase perempuan di legislatif dan Eksekutif	Persentase	26,24	300.000.000	Indikator program di gabung
1	Fasilitasi Kebijakan Peningkatan Peran dan Posisi Perempuan dibidang Politik	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	Dokumen	1	150.000.000		Fasilitasi Kebijakan Peningkatan Peran dan Posisi Perempuan dibidang Politik	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	Dokumen	1	150.000.000	Kata judul kegiatan di tambahi ...sosial, hukum

No	Rancangan Awal RKPD						No	Hasil Analisis Kebutuhan						Penanggung Jawab
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Indikatif		Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Workshop Peningkatan Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan	Kab. Kukar	Jumlah Peserta	Peserta	100	150.000.000		Workshop Peningkatan Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan	Kab. Kukar	Jumlah Peserta	Peserta	100	150.000.000	Judul kegiatan dikurangi
3	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Tenaga Kerja Perempuan	Kab. Kukar	Jumlah Peserta	Peserta	250	150.000.000		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Tenaga Kerja Perempuan	Kab. Kukar	Jumlah Peserta	Peserta	250	150.000.000	Judul kegiatan salah ketik di simral (yang benar yang ini)
	Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan		Persentase Pelaku Usaha Perempuan yang mendapatkan pembinaan		2.14	450.000.000		Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan		Persentase Pelaku Usaha Perempuan yang mendapatkan pembinaan		2.14	450.000.000	
1	Bimbingan Manajemen Bagi Pelaku Usaha Perempuan	Kab. Kukar	Jumlah Pelaku Usaha Perempuan yang diberi bimbingan	Kelompok	200	250.000.000		Bimbingan Manajemen Bagi Pelaku Usaha Perempuan	Kab. Kukar	Jumlah Pelaku Usaha Perempuan yang diberi bimbingan	Kelompok	200	250.000.000	
2	Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan	Kab. Kukar	Jumlah Pameran	Pameran	5	200.000.000		Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan	Kab. Kukar	Jumlah Pameran	Pameran	5	200.000.000	Pindahan dari program peningkatan kualitas
	Program Pemenuhan Hak-hak Anak		Tingkatan Kota Layak Anak	%	55,56	2.785.000.000		Program Pemenuhan Hak-hak Anak		Tingkatan Kota Layak Anak	%	55,56	2.785.000.000	Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak
1	Fasilitasi Kabupaten Layak Anak (KLA)	Kab. Kukar	Jumlah Kecamatan yg menginisiasi KLA	Kecamatan	10	200.000.000		Fasilitasi Kabupaten Layak Anak (KLA)	Kab. Kukar	Jumlah Kecamatan yg menginisiasi KLA	Kecamatan	10	200.000.000	Kasubbid. ...
2	Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD KLA)	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen RAD KLA	Dokumen	1	185.000.000		Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD KLA)	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen RAD KLA	Dokumen	1	185.000.000	
3	Penyusunan Profil Anak Kabupaten Kutai Kartanegara	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen profil anak	Dokumen	1	300.000.000		Penyusunan Profil Anak Kabupaten Kutai Kartanegara	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen profil anak	Dokumen	1	300.000.000	
4	Pelatihan Konvensi Hak anak	Kab. Kukar	Jumlah orang yg terlatih KHA	Orang	90	250.000.000		Pelatihan Konvensi Hak anak	Kab. Kukar	Jumlah orang yg terlatih KHA	Orang	90	250.000.000	
5	Parenting bagi orang tua siswa	Kab. Kukar	Jumlah orang tua yang mengerti cara mendidik anak	Orang Tua	200	500.000.000		Parenting bagi orang tua siswa	Kab. Kukar	Jumlah orang tua yang mengerti cara mendidik anak	Orang Tua	200	500.000.000	
6	Fasilitasi Forum anak	Kab. Kukar	Jumlah anak yang menjadi pengurus forum anak	Anak	50	200.000.000		Fasilitasi Forum anak	Kab. Kukar	Jumlah anak yang menjadi pengurus forum anak	Anak	50	200.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD						No	Hasil Analisis Kebutuhan						Penanggung Jawab
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Indikatif		Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	Fasilitasi Hari Besar Anak	Kab. Kukar	Jumlah anak yang mengikuti hari besar anak	Anak	500	200.000.000		Fasilitasi Hari Besar Anak	Kab. Kukar	Jumlah anak yang mengikuti hari besar anak	Anak	500	200.000.000	
8	Worskshop gerakan mendongeng	Kab. Kukar	Jumlah Guru dan anak yang bisa mendongeng	Orang	200	250.000.000		Worskshop gerakan mendongeng	Kab. Kukar	Jumlah Guru dan anak yang bisa mendongeng	Orang	200	250.000.000	
9	Fasilitasi Forum Peduli ABK	Kab. Kukar	Jumlah Forum yang terbentuk	Anak	4	250.000.000		Fasilitasi Forum Peduli ABK	Kab. Kukar	Jumlah Forum yang terbentuk	Anak	4	250.000.000	
10	Fasilitasi Pelatihan Komunikasi terapis autis (ABK)	Kab. Kukar	Tenaga terapis yang terlatih	Tenaga Terapis	5	300.000.000		Fasilitasi Pelatihan Komunikasi terapis autis (ABK)	Kab. Kukar	Tenaga terapis yang terlatih	Tenaga Terapis	5	300.000.000	
11	Fasilitasi Pusat Pembelajaran keluarga (Fuspaga)	Kab. Kukar	Jumlah Keluarga yang terlayani	Keluarga	150	150.000.000		Fasilitasi Pusat Pembelajaran keluarga (Fuspaga)	Kab. Kukar	Jumlah Keluarga yang terlayani	Keluarga	150	150.000.000	
	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan					2.750.000.000		Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan					2.750.000.000	
			Cakupan pelayanan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO	%	100	2.450.000.000				Cakupan pelayanan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO	%	100	2.450.000.000	Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
1	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)	Kab. Kukar	Jumlah Pengaduan yang terlayani	Pengaduan				Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)	Kab. Kukar	Jumlah Pengaduan yang terlayani	Pengaduan			
2	Fasilitasi Pendampingan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	Kab. Kukar	Jumlah Korban Kekerasan Perempuan dan Anak yang dilayani	Korban	110	500.000.000,00		Fasilitasi Pendampingan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	Kab. Kukar	Jumlah Korban Kekerasan Perempuan dan Anak yang dilayani	Korban	110	500.000.000,00	
3	Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	Kab. Kukar	Jumlah korban kekerasan yang difasilitasi	Korban Kekerasan	100	150.000.000		Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	Kab. Kukar	Jumlah korban kekerasan yang difasilitasi	Korban Kekerasan	100	150.000.000	Kasubbid. ...

No	Rancangan Awal RKPD						No	Hasil Analisis Kebutuhan						Penanggung Jawab
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Indikatif		Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT	Kab. Kukar	Jumlah Tenaga Terlatih dalam Pelayanan dan Pendampingan KTP/KTA	Aparatur	50	250.000.000		Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT	Kab. Kukar	Jumlah Tenaga Terlatih dalam Pelayanan dan Pendampingan KTP/KTA	Aparatur	50	250.000.000	
5	Sosialisasi Perundang-Undangan Kebijakan Tentang Perlindungan Perempuan/Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Kab. Kukar	Jumlah peserta Sosialisasi Perundang-Undangan Kebijakan Tentang Perlindungan Perempuan/Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Orang	100	150.000.000		Sosialisasi Perundang-Undangan Kebijakan Tentang Perlindungan Perempuan/Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Kab. Kukar	Jumlah peserta Sosialisasi Perundang-Undangan Kebijakan Tentang Perlindungan Perempuan/Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Orang	100	150.000.000	
6	Fasilitasi Penanganan masalah kekerasan terhadap anak	Kab. Kukar	Jumlah Fasilitasi penanganan masalah kekerasan terhadap anak	Korban Kekerasan	100	150.000.000		Fasilitasi Penanganan masalah kekerasan terhadap anak	Kab. Kukar	Terlaksananya Fasilitasi penanganan masalah kekerasan terhadap anak	Korban Kekerasan	100	150.000.000	Kasubbid. ...
7	Sosialisasi masalah sosial anak	Kab. Kukar	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi di sekolah	Anak	50	100.000.000		Sosialisasi masalah sosial anak	Kab. Kukar	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi di sekolah	Anak	50	100.000.000	
8	Sosialisasi Perundang-Undangan Kebijakan Tentang Perlindungan anak/Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Kab. Kukar	Jumlah peserta sosialisasi Perundang-Undangan Kebijakan Tentang Perlindungan Anak/Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Orang	100	150.000.000		Sosialisasi Perundang-Undangan Kebijakan Tentang Perlindungan anak/Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Kab. Kukar	Jumlah peserta sosialisasi Perundang-Undangan Kebijakan Tentang Perlindungan Anak/Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Orang	100	150.000.000	
9	Pemetaan Jumlah kekerasan perempuan dan anak Kab. Kutai Kartanegara	Kab. Kukar	Jumlah dokumen angka kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah Dokumen	100	150.000.000		Pemetaan Jumlah kekerasan perempuan dan anak Kab. Kutai Kartanegara	Kab. Kukar	Jumlah dokumen angka kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah Dokumen	100	150.000.000	
10	Penyediaan Layanan Perlindungan bagi Perempuan dan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	Kab. Kukar	Jumlah Pengaduan yang Terlayani	Korban Kekerasan	190	400.000.000		Penyediaan Layanan Perlindungan bagi Perempuan dan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	Kab. Kukar	Jumlah Pengaduan yang Terlayani	Korban Kekerasan	190	400.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD						No	Hasil Analisis Kebutuhan						Penanggung Jawab
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Indikatif		Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	Pelatihan pendampingan korban kekerasan anak	Kab. Kukar	Jumlah aparatur yang mendapat pelatihan di Tk Kab, Kec & Kel	Aparatur	30	200.000.000		Pelatihan pendampingan korban kekerasan anak	Kab. Kukar	Jumlah aparatur yang mendapat pelatihan di Tk Kab, Kec & Kel	Aparatur	30	200.000.000	
12	Pelatihan SOP dan SPM Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Kab. Kukar	Jumlah aparatur yang mendapat pelatihan di Tk Kab, Kec & Kel	Aparatur	50	250.000.000		Pelatihan SOP dan SPM Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Kab. Kukar	Jumlah aparatur yang mendapat pelatihan di Tk Kab, Kec & Kel	Aparatur	50	250.000.000	Kasubbid. ...
		Kab. Kukar	Persentase kelompok Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang aktif	%	23,63	300.000.000			Kab. Kukar	Persentase kelompok Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang aktif	%	23,63	300.000.000	
1	Pembentukan kelompok Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Kab. Kukar	Jumlah kelompok Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang dibentuk	Kelompok	20	200.000.000		Pembentukan kelompok Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Kab. Kukar	Jumlah kelompok Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang dibentuk	Kelompok	20	200.000.000	
2	Pelatihan Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Kab. Kukar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan	Orang	30	100.000.000		Pelatihan Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Kab. Kukar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan	Orang	30	100.000.000	
J U M L A H						11.656.110.880		J U M L A H						11.656.110.880

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam kegiatan musyawarah perencanaan pengembangan (Musrenbang) desa ataupun musrenbang kecamatan tidak terdapat usulan dari masyarakat yang berhubungan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Kutai kartanegara.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1 Program dan Kegiatan Perubahan

a. Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Dinas PP & PA Kabupaten Kutai Kartanegara berusaha memberikan pelayanan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan visi, misi dan program bupati dan wakil bupati. Dalam upaya pemberian layanan pada masyarakat masih terdapat permasalahan yang disebabkan adanya faktor penghambat. Namun demikian terdapat faktor pendorong yang berkontribusi positif dalam perbaikan layanan, dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

No.	Visi	Misi	Masalah	Akar Masalah	Alternatif Pemecahan Masalah	Program
1	2	3	4	5	6	7
	Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan	Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta penguatan perlindungan anak	Masih tingginya korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dan belum didampingi seluruhnya oleh tenaga terlatih	Belum memiliki pendamping korban tingkat kecamatan/desa	Membentuk kelompok Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
				Kurangnya pemahaman masyarakat dampak dari kekerasan pada perempuan dan anak	Memberikan pemahaman ke masyarakat tentang kekerasan dan dampak dari kekerasan pada perempuan dan anak	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

No.	Visi	Misi	Masalah	Akar Masalah	Alternatif Pemecahan Masalah	Program
1	2	3	4	5	6	7
			Kurangnya pemahaman stakeholder terhadap hak-hak anak	Para pengambil kebijakan belum banyak membuat kebijakan yang responsif anak	Mendorong stakeholder untuk responsif terhadap pemenuhan hak anak	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
						Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
						Program Pemenuhan Hak-Hak Anak
			Kelembagaan PUG di OPD belum Optimal	Masih Banyak ASN yang Belum Memahami Tentang PUG	Fasilitasi dan advokasi kepada OPD beserta seluruh ASN didalamnya untuk implementasi PUG	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak PUG
			Rendahnya Angka IPG dan IDG	Belum Optimalnya OPD yang terkait Dengan IPG dan IDG	Sinkronisasi dan Penguatan Indikator Variabel IPG dan IDG oleh Masing Masing OPD Terkait	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
			Belum terwujudnya keadilan dan kesetaraan Gender (KKG) secara maksimal	Rendahnya Pratisipasi terhadap Pembangunan Kesetaraan Gender	Mempercepat Implementasi PUG dan Memperkuat Peran Perempuan dalam Berbagai Aspek Pembangunan	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
			Implementasi Kebijakan masih belum Optimal	Konsistensi terhadap pelaksanaan kebijakan masih kurang	Memperkuat dan Mempertajam pelaksanaan kebijakan terhadap peran, kedudukan dan fungsi pemberdayaan pp dan anak	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
			Kurangnya perempuan sebagai pelaku ekonomi	Akses pp dalam mendapatkan informasi usaha masih sulit.2.Kurangnya permodalan usaha.3.Rendahnya kualitas SDM	Memberikan akses Informasi dan kesempatan seluas luasnya bagi perempuan untuk memperoleh bantuan modal serta memberikan bimbingan manajemen usaha	Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

b. Rekapitulasi Program dan Kegiatan Perubahan

Untuk menyesuaikan dengan perkembangan situasi, maka kegiatan perubahan pada Dinas PP dan PA Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2020 mengalami perubahan baik dari jumlah kegiatan dan rencana pagu dana. Adapun jumlah kegiatan dalam tahun 2020 pada APBD Murni adalah sebanyak 39 Kegiatan dan 9 Program sedangkan pada Anggaran perubahan Tahun 2020 yaitu sebanyak 37 kegiatan yang tersebar pada 9 program.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Renstra Kementerian dan Provinsi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ada perubahan terhadap indikator program :

No	Program/Pembangunan	Indikator	Cara Hitung
1.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase OPD yang Melaksanakan ARG	Jumlah OPD yang melaksanakan ARG dibagi jumlah OPD Keseluruhan dikalikan 100%
		Persentase PD yang memiliki data gender	Jumlah PD yang memiliki data gender dibagi jumlah PD dikali 100
2.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan di legislatif dan Eksekutif	(Jumlah Anggota DPRD Perempuan ditambah Perempuan yang Menduduki Jabatan)dibagi(jumlah anggota DPRD ditambah Jabatan yang tersedia)dikali 100
3.	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Cakupan pelayanan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO	Jumlah Kekerasan pada perempuan dan anak termasuk TPPO yang dilayani dibagi Jumlah Kekerasan pada perempuan dan anak termasuk TPPO x 100
		Persentase kelompok Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang aktif	Jumlah PATBM yang terbentuk dibagi jumlah desa x 100

No	Program/Pembangunan	Indikator	Cara Hitung
4.	Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Persentase Pelaku Usaha Perempuan yang mendapatkan pembinaan	Jumlah pelaku usaha perempuan yg dibina dibagi Jumlah Pelaku Usaha Perempuan x 100
5.	Program Pemenuhan Hak-hak Anak	Kecamatan Layak Anak	Jumlah kecamatan yang menginisiasi KLA dibagi dengan jumlah kecamatan x 100

Dengan perincian dapat dilihat dari Tabel IV.I (Program dan Kegiatan Perubahan OPD Tahun 2020)

Tabel IV

Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Urusan/ Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	APBD 2020					Usulan Perubahan Renja 2020		Selisih Antara Pagu APBD 2020 dengan Usulan Perubahan	Catatan Penting	Penanggung Jawab
			Lokasi	Satuan	T	Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif	Sumber Dana	T	Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		%	100	971,923,914.48		100	924,331,644.48	(47,592,270.00)		Sekretaris DP3A
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Komunikasi dan Informasi	DP3A	bulan	12	25,440,000.00	APBD	12	25,440,000.00	-		
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan Dinas	DP3A	unit	25	20,000,000.00	APBD	25	13,000,000	(7,000,000.00)	Rasionalisasi	
3	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Perbaikan peralatan Kerja	DP3A	Unit	52	40,000,000.00	APBD	52	40,000,000.00	-		
4	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan Alat Tulis Kantor	DP3A	jenis	52	75,000,000.00	APBD	52	75,000,000.00	-		
5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	DP3A	Cetakan	2.205	8,820,000.00	APBD	2.205	8,820,000.00	-		
6	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih	DP3A	Exp	15	5,000,000.00	APBD	15	5,000,000.00	-		
7	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah makan minum	DP3A	bulan	12	40,000,000.00	APBD	12	40,000,000.00	-		

8	Penyediaan Jasa Administrasi Tekhnis Perkantoran	Jumlah Tenaga Honorer	DP3A	orang	19	379,389,994.48	APBD	19	379,389,994.48	-		
9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan penggandaan	DP3A	Jenis	1518	8,273,920.00	APBD	1518	8,273,920.00	-		
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Jumlah Aparatur	DP3A	orang	62	260,000,000.00	APBD	32	260,000,000	-		
11	Penataan Arsip Internal Perangkat Daerah	Jumlah paket penataan arsip	DP3A	Paket	1	35,000,000.00	APBD	1	35,000,000.00	-		
12	Fasilitasi Memperingati Hari-hari Besar tertentu (Pameran)	Jumlah Pameran	TGR-Sangasanga	pameran	2	75,000,000.00	APBD	1	34,407,730.00	(40,592,270.00)	Rasionalisasi	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana Prasarana dalam Kondisi Baik		%	100	176,500,000		100	176,500,000	-		Sekretaris DP3A
13	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional DPP & PA	DPP & PA	Unit	28	71,500,000	APBD	25	71,500,000	-		
14	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan	DPP & PA	Unit	15	105,000,000	APBD	15	105,000,000	-		
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Nilai Kinerja SKP		Rata-rata	85	100,000,000		85	-	(100,000,000.00)		Sekretaris DP3A
15	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah	Jumlah orang yang difasilitasi	DPP & PA	Orang	20	100,000,000	APBD	-	-	(100,000,000.00)	Rasionalisasi	

IV	Program Peningkatan Pengembangan System Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketepatan Waktu Laporan Keuangan dan Aset		%	100%	266,804,000		100%	266,804,000	-		Sekretaris DP3A
		Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA			100	100,000,000			100,000,000	-		
16	Penyusunan Dokumen Rencana, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen	DPP & PA	Dukumen	6	100,000,000	APBD	6	100,000,000	-		
		Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Aset			71.42	47,844,800		71.42	47,844,800	-		
17	Rekonsiliasi Pengeloaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen	DPP & PA	Dukumen	12	47,844,800		12	47,844,800	-		
		Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit			100	118,959,200		100	118,959,200	-		
18	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen	DPP & PA	Dukumen	3	118,959,200	APBD	3	118,959,200	-		
V	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak					1,200,000,000			805,518,100	(394,481,900.00)		Bidang KHPKKDI
		Persentase OPD yang melaksanakan ARG	Kab.Kukar	%	89.66	1,050,000,000		82.76	708,018,100	(341,981,900.00)		
19	Rapat Koordinasi PP dan PA	Jumlah Orang	Kab.Kukar	orang	58	250,000,000		37	150,400,000	(99,600,000.00)	Rasionalisasi	

20	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah Organisasi	Kab.Kukar	Organisasi	8	300,000,000		5	185,000,000	(115,000,000.00)	Rasionalisasi	
21	Workshop Penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Jumlah peserta workshop PPRG	Kab.Kukar	orang	200	350,000,000		200	277,518,100	(72,481,900.00)	Rasionalisasi	
22	Penguatan Pokja PUG	Jumlah POKJA PUG		Pokja	58	150,000,000		37	95,100,000	(54,900,000.00)	Rasionalisasi	
		Persentase PD yang memiliki Data Gender		%	89.66	150,000,000	APBD	93.10	97,500,000	(52,500,000.00)		
23	Penyusunan Data Terpilah Gender	Jumlah Dokumen	Kab.Kukar	Dokumen	1	150,000,000		1	97,500,000	(52,500,000.00)	Rasionalisasi	
VI	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan di legislatif dan Eksekutif		Persentase	26.24	150,000,000		25.48	90,000,000	(60,000,000.00)		Bidang KHPKKDI
24	Workshop Peningkatan Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan	Jumlah Peserta	Kab.Kukar	Orang	100	150,000,000	APBD	70	90,000,000	(60,000,000.00)	Rasionalisasi	
VII	Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Persentase Pelaku Usaha Perempuan yang mendapatkan pembinaan			2.14	391,940,120		7.43	236,742,978	(155,197,142.00)		Bidang KHPKKDI
25	Bimbingan Manajemen Bagi Pelaku Usaha Perempuan	Jumlah Pelaku Usaha Perempuan yang diberi bimbingan	Tgr, Ma Badak, Marangkayu, Loa Kulu, Loa Janan, Sanga-sanga	Pelaku Usaha	200	341,940,120	APBD	200	236,742,978	(105,197,142.00)	Rasionalisasi	
	Pengadaan Alat Mesin Jahit Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Perempuan dan Anak	Jumlah Pelaku Usaha Perempuan yang diberi bimbingan	Anggana	Pelaku Usaha	1	50,000,000	APBD			(50,000,000.00)	Rasionalisasi	

VIII	Program Pemenuhan Hak-hak Anak	Tingkatan Kota Layak Anak		%	55.56	1,260,000,000		44.44	819,000,000	(441,000,000.00)		Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak
26	Fasilitasi Kabupaten Layak Anak (KLA)	Jumlah Kecamatan yg menginisiasi KLA	Kab. Kukar	Kecamatan	10	200,000,000	APBD		60,000,000.00	(140,000,000.00)	Rasionalisasi	
27	Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD KLA)	Jumlah Dokumen RAD KLA	Kab. Kukar	Dokumen	1	185,000,000	APBD	0	185,000,000.00	-		
28	Pelatihan Konvensi Hak anak	Jumlah orang yg terlatih KHA	Kab. Kukar	Orang	90	150,000,000	APBD	0	150,000,000.00	-		
29	Fasilitasi Forum anak	Jumlah anak yang menjadi pengurus forum anak	Kab. Kukar	Orang	50	200,000,000	APBD	90	130,000,000.00	(70,000,000.00)	Rasionalisasi	
30	Fasilitasi Hari Besar Anak	Jumlah anak yang mengikuti hari besar anak	Kab. Kukar	Anak	500	100,000,000	APBD	200	-	(100,000,000.00)	Rasionalisasi	
31	Fasilitasi Forum Peduli ABK	Jumlah Forum yang terbentuk	Kecamatan dan Desa	Forum	4	250,000,000	APBD	25	119,000,000.00	(131,000,000.00)	Rasionalisasi	
32	Fasilitasi Pusat Pembelajaran keluarga (Puspaga)	Jumlah Keluarga yang terlayani	Kab. Kukar	Keluarga	175	175,000,000	APBD	500	175,000,000.00	-		
IX	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan					1,160,597,000			772,310,100	(388,286,900.00)		Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
		Cakupan pelayanan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO		%	100	1,000,597,000	APBD	90	668,310,100	(332,286,900.00)		
33	Fasilitasi Pendampingan Korban Kekerasan Pada Perempuan dan Anak	Jumlah korban kekerasan Perempuan dan Anak yang difasilitasi	Kab. Kukar	Pengaduan	110	488,240,000	APBD	72	332,356,000	(155,884,000.00)	Rasionalisasi	

34	Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	Jumlah korban kekerasan yang difasilitasi	Kab. Kukar	Korban	100	100,000,000	APBD	40	65,000,000	(35,000,000.00)	Rasionalisasi	
35	Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT	Jumlah Tenaga Terlatih dalam Pelayanan dan Pendampingan KTP/KTA	Kab. Kukar	Aparatur	50	112,357,000	APBD	32	96,076,000	(16,281,000.00)	Rasionalisasi	
36	Fasilitasi Penanganan masalah kekerasan terhadap anak	Terlaksananya Fasilitasi penanganan masalah kekerasan terhadap anak	Kab. Kukar	Korban	100	100,000,000	APBD	40	65,000,000	(35,000,000.00)	Rasionalisasi	
37	Sosialisasi masalah sosial anak	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi di sekolah	Kab. Kukar	Orang	50	100,000,000	APBD	50	44,878,100	(55,121,900.00)	Rasionalisasi	
38	Pemetaan jumlah kekerasan perempuan dan anak Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen angka kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kab. Kukar	Dokumen	1	100,000,000	APBD	1	65,000,000	(35,000,000.00)	Rasionalisasi	
		Persentase kelompok Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang aktif		%	23.63	160,000,000	APBD	32.07	104,000,000	(56,000,000.00)		
39	Pembentukan kelompok Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Jumlah kelompok Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang dibentuk	Kab. Kukar	Kelompok	16	160,000,000	APBD	10	104,000,000	(56,000,000.00)	Rasionalisasi	
J U M L A H						5,677,765,034.48			4,091,206,822.48	(1,586,558,212.00)		

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020. Proses penyusunan RKPD Tahun 2020 mengacu pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan rencana kerja pemerintah.

a) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian

1. Kondisi sarana dan prasarana yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara masih belum memadai terutama untuk keperluan printer dan komputer yang sudah banyak mengalami rusak berat.
2. Keadaan kantor yang masih belum representatif untuk menyelenggarakan organisasi dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak khususnya ruangan untuk menangani kekerasan perempuan dan anak serta keperluan ruang arsip dan ruang barang rusak.
3. Ketiadaan sumber daya aparatur yang khusus untuk menangani perempuan dan anak korban kekerasan dari segi psikologis menjadikan kendala bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara dalam operasional organisasi.
4. Banyak lokasi korban kekerasan pada perempuan dan anak yang memerlukan biaya besar untuk dijangkau.

b) Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak disesuaikan dengan adanya Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditunjuk langsung oleh Presiden RI melalui Kementerian PP PA RI pada Tahun 2006 bersama empat kabupaten/kota menjadi kabupaten menuju Kabupaten Layak Anak (Sidoarjo, Gorontalo, Jambi, Solo, dan Kutai Kartanegara) diperkuat dengan Instruksi Bupati Kutai Kartanegara nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) di Kecamatan dan Kelurahan/ Desa. Dalam menentukan arah jalannya organisasi salah satunya adalah Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

c) Rencana Tindak Lanjut.

Mendorong upaya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga melalui pendirian aktifis Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat (PATBM) di setiap kecamatan dan di setiap desa ataupun kelurahan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras, oleh sumber daya manusia di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka merencanakan pembangunan daerah dan menciptakan *good governance* di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tenggarong, 14 September 2020
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kab. Kutai Kartanegara



Hj. Aji Lina Rodiah, SE
NIP. 19650325 198503 2 010